

Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme

**Yohanes Alfrid Aliano*, Yeremia Anton Julianus Welan, Stefanus Lau,
Josep Arianto**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

*alfridyohanes@gmail.com

Abstract

This study discusses the phenomenon of the "Politics of Love" as a response to the increasing politics of individualism in the context of critical analysis of Political Ethics, with reference to the views expressed in Fratelli Tutti's encyclical 154. The background of this research involves concerns about globalization which increasingly emphasizes individualism in dynamics. Politics, which can threaten the principles of social solidarity and bonum commune. The main objective of this research is to identify the key elements of the concept of "Politics of Love" advocated by Fratelli Tutti as an alternative to the politics of individualism. The method used involves critical text analysis of the 154 encyclicals, with a focus on historical context and in-depth theological interpretation. The results of this study reveal that the "Politics of Love" advocates the adoption of a more inclusive, collaborative, and caring approach to the common good. This includes rejecting narrow views that only prioritize the interests of certain individuals or groups. This research also highlights the importance of moral leadership in promoting solidarity, shared prosperity, and the spread of human values. This research shows that in facing the political challenges of increasingly strong individualism, the concept of "Politics of love" can be an ethical guide that has the potential to restore the principles of inclusiveness and mutual care in the world of politics. By referring to the teachings of Fratelli Tutti, this research underscores the need for a transformation in the political paradigm towards an approach that is more oriented towards love, equality and social justice for the common good.

Keywords: Politics of Love; Democracy; Ethics; Pancasila; Fratelli Tutti

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena "Politik Kasih" sebagai respons terhadap meningkatnya politik individualisme dalam konteks analisis kritis terhadap Etika Politik, dengan merujuk pada pandangan yang diungkapkan dalam Ensiklik Fratelli Tutti 154. Latar belakang penelitian ini melibatkan kekhawatiran terhadap arus globalisasi yang semakin menonjolkan individualisme dalam dinamika politik, yang dapat mengancam prinsip solidaritas sosial dan prinsip *bonum commune* dalam masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari konsep "Politik Kasih" yang dianjurkan dalam ensiklik Fratelli Tutti 154 sebagai alternatif terhadap politik individualisme. Metode yang digunakan melibatkan analisis teks kritis terhadap artikel 154 ensiklik tersebut, dengan fokus pada konteks historis dan interpretasi teologis yang mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa "Politik Kasih" mengadvokasi adopsi pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Hal ini mencakup penolakan terhadap pandangan sempit yang hanya memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan moral dalam mempromosikan solidaritas, kesejahteraan bersama, dan penyebaran nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan politik individualisme yang semakin kuat, konsep "Politik Kasih" dapat menjadi panduan etis yang berpotensi untuk mengembalikan prinsip-prinsip inklusif dan saling peduli dalam dunia politik. Dengan merujuk pada ajaran Fratelli Tutti, penelitian ini menggarisbawahi perlunya transformasi dalam paradigma politik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kasih, kesetaraan, dan keadilan sosial demi kebaikan bersama.

Kata Kunci: Politik Kasih; Demokrasi; Etika; Pancasila; Fratelli Tutti

Pendahuluan

Saat ini, dalam konteks politik dan sosial, perdebatan tentang peran politik individualisme dan alternatifnya semakin relevan. Konsep politik individualisme telah menjadi aspek sentral dalam pemikiran politik modern, dengan fokus pada penekanan terhadap hak individu, kebebasan, dan pencapaian tujuan pribadi yang semakin mengurangi nilai demokrasi kekuatan-kekuatan politik Indonesia (Jurdi, 2016). Namun, dampak dari individualisme yang ekstrem telah menghasilkan isolasi sosial, ketidaksetaraan, dan kekurangan solidaritas dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pandangan ini mulai disorot oleh kritik dan penelitian yang mengusulkan perlunya "Politik Kasih" sebagai tanggapan terhadap politik individualisme. Pandangan ini terinspirasi oleh ensiklik Fratelli Tutti Paus Fransiskus, khususnya pada artikel 154, di mana terdapat panggilan untuk membentuk tatanan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip kasih, solidaritas, dan perhatian terhadap sesama. Dalam konteks inilah, "Politik Kasih" muncul sebagai alternatif yang mengusulkan penolakan terhadap sikap egoistik dalam politik dan mengajak pada pemikiran yang lebih inklusif dan kolektif.

Namun, meskipun gagasan ini menerima perhatian yang semakin besar, pengimplementasiannya masih menghadapi tantangan. Keberlanjutan dan aplikabilitas "Politik Kasih" dalam sistem politik yang telah terstruktur sangat individualistik memerlukan transformasi yang mendalam. Selain itu, pertanyaan mendasar mengenai bagaimana menerjemahkan konsep kasih ke dalam kebijakan konkret dan tindakan politik tetap menjadi subjek analisis yang penting sebagai bentuk kesucian demokrasi politik di tengah krisis kemanusiaan (Andalas, 2008).

Studi dalam analisis kritis terhadap Etika Politik, terutama melalui lensa Fratelli Tutti 154, berperan penting dalam menguraikan makna dan implikasi dari "Politik Kasih" dan bagaimana ia dapat berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap politik individualisme. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks dan konteks, penelitian ini mengarahkan perhatian pada bagaimana tatanan politik yang didasarkan pada nilai-nilai kasih dan solidaritas dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam skala yang lebih luas.

Pemilihan umum menjadi term untuk menyebut istilah pesta rakyat yang kental di Indonesia. Dunia juga menyebutnya pesta rakyat meski dengan bahasa yang berbeda. Namun, pikiran penulis sedikit menggelitik, benarkah itu sungguh-sungguh pesta rakyat? Sungguhkah rakyat bergembira ria saat pemilu itu tiba? Apakah politik itu sungguh berlandaskan 'politik kasih' yang memanusiawikan? Lantas bagaimana peran Etika politik kasih dalam isu politik di Indonesia?. Bisa jadi pemilu adalah pesta kaum konglomerat hanya saja dibuat seolah-olah pesta rakyat. Perhatikan saja siapa yang mengambil peran paling banyak dalam pemilu, pasti kelompok, partai dan para politikus saja yang paling aktif memainkan perannya. Sedangkan rakyat kecil hanya menjadi penonton yang juga kerap kali tak mengerti asas dan tujuan pemilu. Toh, saat pemilu tiba apakah yang miskin langsung kaya karena BBM sudah turun, atau harga sembako semakin murah, atau kesejahteraan rakyat meningkat pesat karena sudah lahir pemimpin baru yang gagah dan cakap? Ternyata tidak juga (Aliano 2022, *The Columnist.com*)

Kaum miskin tetap mengemis dan mati kelaparan. Kaum tunawisma ya tetap tinggal di jalanan, Kaum tunanetra ya masih dibutakan oleh janji-janji kampanye, kaum tunawicara akan tetap terdiam meratapi hak berbicaranya yang tak pernah didengarkan dan sebagainya (Andalas, 2008). Syukur kepada Allah kalau pada akhirnya pemimpin yang baru tersebut sungguh-sungguh memiliki hati nurani dan sikap 'politik kasih' yang sungguh berjuang demi kesejahteraan rakyat. Maka, Paus Fransiskus melalui Ensiklik Fratelli Tutti (190-192) mengingatkan para pemimpin politik hendaknya mampu mengayomi dengan kasih yang berdaya menyatukan dan mengumpulkan. Ini bukan utopia melainkan target yang tinggi. Tantangan bagi politik sekarang ialah mempersatukan individu dan kelompok yang hidup dalam logika eksklusivisme.

Berpaling ke etika politik kasih, Fratelli Tutti (193-194) lebih lanjut menegaskan seorang pemimpin politik memikirkan kebutuhan komunitas warga. Dan, ia ditantang untuk lebih khusus memerhatikan kaum lemah dan terpinggirkan. Mengutamakan yang lemah tidak mengurangi mutu politik. Sebab, seorang politisi juga adalah manusia, yang tentu memiliki dalam diri hasrat untuk mengasihi sesama. Sebagai manusia ia juga memiliki tempat dalam hati untuk mengasihi dengan kehangatan kasih. Maka Gereja mau mengajak semua elemen untuk bersama menciptakan perubahan dalam hal kebebasan warga negara, reksa kesejahteraan bersama serta perubahan menata hubungan (antara warga negara dan pemerintah) demi menciptakan keadilan dengan semangat kasih (Harefa, 2020).

Lantas mengapa para politikus tersebut sudah ramai-ramai mengusung calonnya, sudah memasang baliho dan spanduk wajah-wajah beserta janji-janji manis. Simpati dan perhatian mulai terblok dimana-mana padahal pekerjaan negara masih banyak. Ini keegoisan politik (Putra, 2019). Bayangkan berapa banyak uang rakyat yang digunakan untuk menarik simpati dan sensasi publik tersebut yang mungkin tidak kita ketahui? Betapa masih banyak anggaran dan dana yang masih banyak diperuntukkan demi rakyat miskin, pemulihan kesehatan, perekonomian yang rata, pembangunan yang signifikan dan lain sebagainya. Namun, harta dan tahta tampak lebih utama padahal membangun martabat manusia pembangun itu lebih utama dan urgen.

Etika politik yang baik dan benar melalui ensiklik Fratelli Tutti (188-189) dengan tegas menyatakan perlu pengorbanan dalam politik. Hal yang urgen dalam politik ialah keberpihakan bagi mereka yang lemah. Dalam situasi krisis, politik kasih memainkan peran penting juga terutama di era digitalisasi yang kian modern dan canggih ini (Hasfi, 2019). Tujuan politik ialah membantu warga semakin mandiri, bukan menjadikan rakyat sasaran pemerasan. Perlindungan anak-anak, orang tua, perempuan dari kekerasan merupakan peran sentral institusi politik dan perangkat hukum. Bencana kelaparan rakyat adalah skandal bagi politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap konsep "Politik Kasih" sebagai alternatif terhadap politik individualisme, dengan merujuk pada pandangan yang diungkapkan dalam artikel 154 ensiklik Fratelli Tutti. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif yang mengkaji konsep "Politik Kasih" dan dampaknya sebagai perlawanan terhadap politik individualisme. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kritis, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks Fratelli Tutti 154 serta konteks sosial, politik, dan teologisnya. Sumber data utama adalah ensiklik Paus Fratelli Tutti, khususnya artikel 154, yang akan dianalisis secara kritis. Selain itu, literatur terkait tentang politik individualisme, konsep politik kasih, dan etika politik juga akan digunakan sebagai sumber data pendukung. Dengan metode pendeskripsian, penelitian

ini menggunakan studi diskursus dari para ahli teologi khususnya seruan Paus Fransiskus dalam Ensiklik Fratelli Tutti 154, ilmu politik, dan etika yang memiliki pemahaman mendalam tentang teks dan konteks Fratelli Tutti 154 serta konsep "Politik Kasih". Instrumen penelitian berupa panduan studi literatur terstruktur yang akan digunakan. Panduan deskripsi tentang kasus politik individualisme, konsep politik kasih, dan implikasinya dalam konteks sosial dan politik. Data yang dihasilkan dari studi literatur akan dianalisis menggunakan metode analisis kritis. Ini melibatkan mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dalam diskursus, serta membandingkannya dengan konsep politik individualisme dan politik kasih yang ada dalam ensiklik Fratelli Tutti 154. Hasil analisis akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik kasih dapat berfungsi sebagai perlawanan terhadap politik individualisme dalam konteks etika politik.

Hasil dan Pembahasan

1. Politik Berkedok Agama

Update berita sebagaimana yang dapat kita akses mengenai pesta politikus ini adalah maraknya kegiatan-kegiatan aktif kaum politisi, kampanye-kampanye terselubung, mulai marak pemasangan spanduk, isu bakal calon presiden, bentuk koalisi partai, pertemuan kubu-kubu partai, mulai pengusungan hingga pengakuan untuk menjadi kandidat calon presiden. Parahnya ada isu relawan-relawan partai yang mengatasnamakan kelompok agama (Andalas, 2008).

Politik dengan mengatasnamakan agama tertentu seperti isu Ahok senyatanya akan membawa pada perang politik yang merugikan semua pihak dan yang paling merasakan dampaknya kelak adalah rakyat kecil, miskin dan cenderung tidak dianggap dan diperhatikan oleh pemimpin negara ini (Solihah, 2018). Isu yang menjadi keluh kesah penulis, keresahan serta tidak masuk akal adalah mengatasnamakan agama Katolik yang dalam hal ini para pemuka atau pemimpin umat Katolik menjadi getah dari sadapan isu pemilu yang terkesan tamak, rakus, tergesa-gesa dan gila hormat dan kekuasaan. Isu tersebut adalah seperti dukungan para uskup Jabodetabek yang dikabarkan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan. Lantas apakah Indonesia ini negara Pancasila atau negara Agama (Dewantara, 2019)?

Itu hoax, penipuan dan informasi yang amat tidak benar. Padahal senyatanya tidaklah demikian. Amat tidak logis dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui struktur hirarki, tugas dan wewenang dari pemimpin Gereja Katolik. Belum lama ini 03 November 2022 pun dikabarkan tujuh puluh pastor di Medan yang dikabarkan mendukung Anies Baswedan (Suhardiman, 2022 Sumutsuara.com). Hoax yang amat plonga-plongo, terkesan licik dan tak sesuai dengan aturan dan kode etik tersebut dalam pemilu maupun kegiatan kampanye. Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti (178-179) kiranya memberi nasihat yang baik, tanda politik yang sehat: siap dan mampu mengatasi situasi sulit dan mampu menjamin kebaikan bersama dalam jangka panjang: sekarang dan masa depan. Politik yang sehat memiliki mimpi akan masa depan manusia yang lebih baik, bukan hanya demi kepentingan elektorat sesaat. Dengan kata lain, jika politik itu sehat, bukan kepentingan ekonomi yang mengendalikannya, tetapi ia menjadi wadah untuk mengarahkan sistem ekonomi demi kesejahteraan bersama (Kasih, 2018).

Untuk diketahui dan perlu ditegaskan kepada seluruh kalangan baik umat Katolik maupun masyarakat Indonesia terutama politikus bahwa para pemimpin Gereja (kaum tertahbis) dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses atau terlibat langsung dalam mendukung pemilu publik (bdk. KHK 287 artikel ke-2) dan penulis kira hal demikian yang ada di Gereja Katolik juga telah diatur dalam kelompok atau komunitas tertentu. Gereja Katolik selalu menjaga persatuan dan kesatuan

multi etnik dan agama, dan tidak pernah memihak kelompok tertentu baik partai atau tokoh tertentu melainkan dengan sikap netralnya menjaga integritas, konsistensi, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Berpaling sejenak ke ASG pada Centesimus Annus (45-47) dan *Gaudium et Spes* (76) menegaskan bahwa agama tidak terikat pada sistem politik manapun dan memiliki masing-masing lahan pengabdian. Kehadiran agama (Gereja) membuka ruang keadilan dan cinta yang universal dan menghormati kebebasan serta tanggung jawab politik warga negara. Agama bebasewartakan iman, melindungi kebebasan pribadi, keluarga dan organisasi sosial apabila kejiwaannya terganggu.

2. Demokrasi Partisipasi Politik

Sebagai salah satu filsuf besar zaman kuno, Aristoteles dengan rajin dan hati-hati bergulat dengan berbagai masalah, termasuk masalah etika dan politik, yang ia masukkan dalam dua karya kolosalnya, *Etika dan Politik Nicomachean* (Aliano dan Riyanto, 2022). Keterlibatan politik, yaitu ketika warga negara secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan negara atau publik, merupakan komponen penting dari politik. Orang-orang di era kontemporer yang lebih pragmatis ini memanfaatkan politik secara singkat dan sempit karena mereka hanya mengasosiasikannya dengan satu elemen tertentu, seperti kekuasaan, hukum, atau regulasi, serta keuntungan sebenarnya dari keterlibatan politik. Oleh karena itu, model kehidupan politik saat ini tidak mendukung kewarganegaraan yang bahagia.

Pengertian umum partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik. Tahap proses apa, misalnya, warga harus mulai berpartisipasi atau melibatkan diri? Masalah ini harus diangkat karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi warga untuk dihubungi hanya ketika keputusan atau kebijakan yang dikembangkan elit politik akan segera dilaksanakan. Masyarakat hanya dimobilisasi untuk mendukung dan memajukan keputusan yang dibuat oleh pihak lain. Penafsiran reduksionis ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Riyanto, 2019). Partisipasi aktif warga negara dalam semua aspek pemerintahan, dari proses pengambilan keputusan hingga peninjauan hasil, termasuk kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaannya, merupakan prasyarat untuk demokrasi sejati. Dalam pengaturan ini, penting bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses politik, termasuk pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasinya (Suryana, 2020).

Orang sering mempertimbangkan siapa yang memutuskan apa yang harus dilakukan negara, berapa lama, dan berapa biayanya ketika mendengar kata politik. Karena merekalah yang mendistribusikan dan menggunakan kekuasaan politik atas nama negara, hanya elit politik atau pemegang kekuasaan politik yang dapat mengklaim kepemilikan politik dalam pengertian terbatas ini. Sementara itu, mayoritas rakyat dianggap sebagai massa mengambang dan hanya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi (berpartisipasi) setiap empat atau lima tahun sekali dalam pemilihan umum. Perspektif politik ini berakibat nyata bahwa pada umumnya warga negara memiliki kecenderungan untuk menjauhkan diri dari politik dan kehilangan minat terhadap segala aktivitas politik (Riska, 2016: 17).

Fenomena meluasnya kelompok golongan putih (golput), di mana masyarakat sengaja memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di seluruh negeri. Pada kenyataannya, ini adalah salah satu contoh paling jelas dari keengganan individu untuk terlibat dalam politik apa pun. Warga negara percaya bahwa menggunakan hak mereka untuk memilih tidak begitu penting atau tidak mempengaruhi hasil dari kehidupan sehari-hari mereka. Padahal senyatanya hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu akomodasi hukum dan politik di Indonesia demi menciptakan demokrasi yang sesuai konstitusi bangsa dari generasi ke generasinya (Tarigan, 2017).

Orang yang berilmu dan penuh kasih tentu akan mendedikasikan bagian terbaik dari dirinya untuk kontemplasi, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran orang lain, serta keberadaan negara, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih manusiawi (Riyanto, 2015). Akibatnya, pertanyaan yang paling esensial bukanlah bagaimana keutamaan moral dihubungkan dengan refleksi politik dalam praktik keutamaan moral. Karena warga negara yang baik mengoptimalkan kemampuan rasionalnya untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin, ia akan mengatur cara hidupnya berdasarkan pertimbangan rasional tentang tujuan hidupnya dan interaksi yang akan membawa kebahagiaan.

Aristoteles, filsuf Yunani, (Tri dan Arrasyid, 2021: 210) menyatakan dalam latar politik seperti ini bahwa politik adalah ilmu yang unggul karena alasan-alasan berikut. Untuk memulai, politik menentukan mata pelajaran mana yang harus dipelajari di negara tertentu. Kedua, politik menentukan segmen individu mana yang diminta untuk mempelajari mata pelajaran ini. Ketiga, politik mengacu pada disiplin lain seperti strategi, ekonomi, retorika, dan sebagainya. Politik menjadi lebih beragam dan kaya ketika melibatkan para profesional dari beberapa bidang. Keempat, politik mengatur apa yang harus dilakukan suatu negara.

Selain alasan-alasan yang disebutkan di atas, Aristoteles menilai kualitas politik dari segi tujuannya. Dia percaya bahwa lebih baik memperoleh kebaikan untuk kota secara keseluruhan daripada kebaikan untuk individu. Dengan demikian tercipta demokrasi yang mencegah oligarki dan tirani (Tinambunan, 2023) Perkataan Najwa Shihab kiranya tepat, “Politik, bagi rakyat, bukan tentang koalisi atau oposisi, tetapi tentang bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan sehari-hari,”

Gagasan partisipasi deliberatif pemerintahan demokratis mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan adalah kompetensi yang berbeda dari aktor politik, yang semuanya adalah warga negara, bukan hanya elit politik (Kasih, 2018). Arendt menekankan kemampuan warga untuk berkomunikasi, berdiskusi, berunding, dan akhirnya bertindak bersama untuk mempertahankan komunitas yang merupakan konsekuensi dari konstruksi kolaboratif melalui tindakan dan diskusi (Magnis-Suseno, 2016: 138-290). Pemerintah sering mengabaikan keterampilan ini karena gagasan sesat bahwa masyarakat itu apolitis dan tidak tahu banyak tentang urusan publik.

Seiring dengan era globalisasi, penekanan harus diberikan pada substansi demokrasi, dimana kekuasaan atau kewenangan rakyat untuk merumuskan dan melaksanakan kehendaknya harus diimbangi dengan kekuasaan negara. Dengan munculnya masyarakat sipil, gagasan ini dibangkitkan kembali. Masyarakat sipil muncul dari kebutuhan untuk membangun hubungan yang seimbang antara masyarakat dan institusi politik untuk membangun demokrasi. Ketika negara dan masyarakat memiliki otoritas yang sama dalam konektivitas akan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik yang baik, demokrasi berjalan dengan sukses (Made, 2015). “Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi masing-masing pihak, bukan pula kompetisi untuk menonjolkan ideologi masing-masing,” kata Ir. Sukarno.

3. Skeptisisme Generasi Demokrasi Digitalisasi

Dunia terus berubah secara teratur. Munculnya demokrasi digital merupakan salah satu pergeseran yang menonjol di antara pasang surut kehidupan bangsa. Demokrasi digital adalah proses demokrasi yang berlangsung di lingkungan virtual yang berpusat di internet. Proses adaptasi dengan demikian dianggap penting bagi setiap individu untuk mencapai keselarasan antara pendekatan dan realitas demokrasi saat ini (Hasfi, 2019). Hal ini terlihat dari pendekatan demokrasi Generasi Z yang didorong oleh perkembangan teknologi internet melalui berbagai produk seperti media sosial. Generasi Z dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi digital yang dapat eksis secara elektronik melalui media sosial.

Menurut *Institute for Emerging Issues* pada tahun 2021, Generasi Z merupakan generasi yang paling berbeda dan melek teknologi (Qudsi dan Syamtar, 2020). Penggunaan teknologi secara ekstensif oleh Generasi Z bukanlah hal baru. Generasi Z adalah generasi pertama yang terpapar teknologi dan internet. Generasi Z atau sering disebut sebagai Generasi Digital (*digital natives*) merupakan generasi yang tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bergantung pada teknologi. Menurut temuan studi *We ARE Social Singapura* (Supratman, 2018), *digital natives* adalah pengguna media sosial yang paling aktif di Indonesia. Setiap hari, penduduk asli digital menghabiskan 79 persen waktunya untuk *online*.

Kedekatan Generasi Z dengan media sosial tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap pola demokrasi bangsa. Marshall McLuhan menjelaskan dalam bukunya *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (Syamtar, 2020) bagaimana implikasi penggunaan teknologi oleh masyarakat pada akhirnya mempengaruhi keberadaan manusia itu sendiri. Keterlibatan politik Generasi Z telah berubah secara dramatis. Generasi Z menggunakan media sosial untuk memfasilitasi integrasi dan periklanan yang lebih cepat dan sederhana.

Menurut penulis, Generasi Z ingin melakukan perubahan progresif pada politik Indonesia secara kontemporer dan lugas. Komponen demokrasi yang tergabung dalam keterlibatan politik Generasi Z kini lebih bersifat kontemporer. Generasi Z tidak perlu turun ke jalan untuk memprotes berbagai ketidakadilan sosial politik. Generasi Z hanya mengandalkan media sosial yang berpotensi memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial politik Indonesia. Pada saat ini, Generasi Z telah membentuk bentuk demokrasi baru (Tarigan, 2017). Jejaring sosial tampaknya menjadi fondasi atau kekuatan utama Generasi Z. Gaya demokrasi Generasi Z yang khas dan sensitif berdampak signifikan terhadap orientasi politik. Namun di tengah optimisme tersebut, politik media sosial dengan fokus utama Generasi Z menjadi masalah yang sangat berat ketika "digunakan" untuk keuntungan pribadi.

Politisi memanfaatkan media sosial yang seharusnya menjadi wadah positif bagi Generasi Z untuk mengorganisir suara untuk kepentingan tertentu. Gerakan transformasional inheren dimanipulasi untuk menyampaikan informasi yang kontradiktif (*hoaks*). Tentu saja, hal ini seringkali mengaburkan kecenderungan progresif Generasi Z. Akibatnya, dukungan publik terhadap Generasi Z tidak hanya akan berkurang, tetapi juga dapat berdampak pada dimensi kehidupan politik Indonesia.

Politisasi media sosial adalah isu kecil yang melemahkan harapan Generasi Z. Pada level ini, media sosial ibarat "Pisau Bermata Dua". Di satu sisi, jejaring sosial dapat membantu individu memperbaiki kehidupan sosial politik mereka. Sementara itu, media sosial dapat memadamkan semangat dan optimisme. Titik kesimpulan, dalam pandangan penulis, sebagai solusi dari dilema ini adalah dengan memaksimalkan sikap skeptis. Skeptisisme adalah aliran filsafat Yunani Kuno yang berpendapat bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Dalam teori ini, kecurigaan terhadap kebenaran menjadi sangat penting. Skeptisisme meragukan "kebenaran" di era demokrasi digital. Dalam hal ini sikap skeptisisme diperlukan dalam melawan politik demokrasi tersebut.

Skeptisisme pada dasarnya memungkinkan kita untuk menolak menerima berbagai jenis informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi dan menguji kebenarannya (Arif, 2015). Dalam sangkar teori skeptis, Generasi Z harus mampu mengawal dan mengawasi dinamika demokrasi bangsa agar tetap pada koridornya. Bagi Generasi Z, pendekatan kritis terhadap 'penciptaan' realitas politik dan komponen teoretis kolaborasi harus didasarkan pada refleksi mendalam. Generasi Z pasti dapat melakukannya melalui penggunaan media sosial yang bijak. Skeptisisme merupakan sikap yang tepat bagi Generasi Z untuk lebih komprehensif, teliti, dan berhati-hati dalam menempatkan

kepercayaan yang disebarluaskan di media sosial. Jika keyakinan Generasi Z terbukti benar, maka demikian pentinglah generasi muda untuk menyumbangkan ide kritisnya melawan politik individualisasi ini.

4. Sinergi Kaum Muda dalam Politik

Demokrasi adalah komponen alami dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia berhak mengharapkan kehidupan yang baik di suatu negara. Demokrasi memajukan kehidupan negara sejauh partisipasi setiap orang. Ketika kepemimpinan Soeharto berakhir pada 21 Desember 1988, terjadi pergeseran tema dan aktor di pentas politik nasional. Suharto gagal mengenali semangat generasi baru yang memahami makna dan semangat demokrasi, yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang adil, demokratis, dan bersih (Aliano, 2022).

Seiring dimulainya era reformasi, pemilu 2004 memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung. Dulu pemerintah otoriter dan korup, kini rakyat bebas mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan. Pemilu 2024 merupakan titik kumpul bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Sistem pemilu 2024 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih siapa yang pantas untuk dipilih. Kebebasan memilih rakyat sebagai bentuk keterlibatan dalam pengelolaan kehidupan yang demokratis. Ada sesuatu yang segar di cakrawala untuk pemilu 2024. Hal ini menandai babak baru dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia. Anak muda dengan pola pikir kritis berada di panggung politik, mengharapkan pemimpin yang layak di pemilu 2024. Menurut kajian yang dilakukan Kompas pada Selasa, 27 September 2022, anak muda usia 17 hingga 39 tahun mengharapkan pemimpin 2024 bersih, berintegritas, anti korupsi, serta tetap sederhana dan merakyat. Kaum muda berharap politisi yang jujur dan tidak korup bisa mewujudkan impiannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, anak muda akan berperan signifikan dalam menentukan peserta demokrasi pada 2024. Menurut *Center for Strategic and International Studies Jakarta*, 8-13 Agustus 2022, Survei Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Pasca Pandemi Sistem Politik, karakter pemimpin yang dicita-citakan bangsa Indonesia pada pemuda tahun 2024 adalah jujur dan tidak korup (34,8 persen). Ada juga pemimpin yang merakyat dan sederhana (15,9%), tangguh dan berwibawa (12,4%), berhasil atau berprestasi saat memimpin (11,6%), dan berpengalaman memimpin (10,1%).

Apa cita-cita anak muda di pemilu 2024 ini sebagai cerminan aspirasi rakyat untuk memajukan demokrasi? Hal ini disebabkan karena pemimpin yang jujur dan bersih tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mereka memandang masa depan dalam menyikapi tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama guna memajukan kesejahteraan hidup bersama. Pemimpin bukan hanya mereka yang memegang posisi penting, memiliki tingkat keterampilan tertinggi, atau hanya memiliki banyak uang; seorang pemimpin pertama dan terutama adalah seseorang yang dapat merangkul banyak orang lain untuk maju bersama. Dalam hal ini Nasjum (2020) menyebut Pancasila sebagai landasan hukum merupakan sistem etika politik yang perlu di tegakkan di Indonesia.

Apa cita-cita anak muda di pemilu 2024 ini sebagai cerminan aspirasi rakyat untuk memajukan demokrasi? Hal ini disebabkan karena pemimpin yang jujur dan bersih tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mereka memandang masa depan dalam menyikapi tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama guna memajukan kesejahteraan hidup bersama. Pemimpin bukan hanya mereka yang memegang posisi penting, memiliki tingkat keterampilan tertinggi, atau hanya memiliki banyak uang; seorang pemimpin pertama dan terutama adalah seseorang yang dapat merangkul banyak orang lain untuk maju bersama.

Pemilihan pemimpin oleh partai politik memiliki kelebihan tersendiri. Partai politik harus memilih pemimpin yang benar-benar siap menyampaikan argumentasi yang masuk akal untuk Pemilu 2024. Menurut Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, partai politik harus berani mengajukan angka dan gagasan untuk Pemilu 2024. Demokrasi kita tidak lagi berdasarkan emosi, tapi logika. Para elit harus mengubah demokrasi prosedural dan emosional menjadi kontes karya dan gagasan. Akibatnya, keinginan partai politik harus berani memutuskan pemimpin yang kompeten.

Kriteria paling krusial yang dituntut publik adalah kejujuran kandidat itu sendiri. Menurut temuan survei, kemampuan lebih signifikan daripada popularitas karakter. Sebanyak 87,8 persen responden mengharapkan parpol menekankan memilih calon presiden yang berintegritas dan memiliki kualitas intelektual untuk memerintah (Kompas. Id, 7 Maret 2022). Alhasil, partai politik memiliki peran dalam menentukan pemimpin yang dibutuhkan kaum muda. Partai politik yang berhak melahirkan pemimpin yang jujur, berwawasan kerakyatan, dan bersih. Jadi, yang penting setiap partai politik sebagai bentuk partisipasi membuka telinga untuk mendengar setiap masukan dari masyarakat agar demokrasi dapat menata kehidupan yang baik.

5. Politik Res Publika Res Populi

Antusiasme seputar pemilu 2024 sudah mulai terlihat. Media cetak dan digital tak henti-hentinya membombardir publik dengan informasi tentang para pemimpin partai yang bolak-balik untuk bertemu. Pertemuan itu menjadi viral ketika para pakar politik memberikan analisis terbaru mereka untuk membantu publik memahami tujuan rahasia pertemuan itu. Sayangnya, ketika publik mendengar analisis politik tentang pertemuan tersebut, mereka mengetahui bahwa pertemuan tersebut tidak bermaksud membahas urusan publik. Namun, yang ada hanyalah kemeriahan dari pimpinan partai, pertukaran kepentingan, atau pemujaan tokoh. Padahal jelas Sidi (2014) menekankan aspek wawasan etika politik harus dibangun dengan sikap kritis dan rasional yang mencerminkan wajah bangsa Indonesia.

Di sisi lain, hiruk pikuk pemilu diperparah dengan persoalan otoritas penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut pandangan penulis, KPU menghadapi setidaknya tiga persoalan utama. Pertama, terjadi insiden antara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dengan Ketua Umum Partai Republik Hasnaeni yang juga dikenal sebagai "wanita emas". Kedua, Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu Bersih menggugat KPU karena melakukan kecurangan dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. KPU terbukti melakukan kesalahan dalam dua dari tiga masalah yang disebutkan sebelumnya, yakni skandal antara Ketua KPU dan Ketua Umum Partai Republik dan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima terkait dugaan kecurangan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Meski baru dua isu yang terbukti, namun tidak menutup kemungkinan isu yang diangkat Koalisi Masyarakat Sipil Pelindung Pemilu Bersih dapat diverifikasi. Lebih lanjut, gugatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Pemilu Bersih sejalan dengan gugatan Partai Prima. Meski isi kedua perkara itu berbeda, namun intinya tetap sama: menggugat kecurangan dalam proses pemilihan partai peserta pemilu.

Insiden yang melibatkan Ketua KPU dan Ketua Umum Partai Republik itu berujung pada penjatuhan denda kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), sanksi ini dijatuhkan. Hasyim Asy'ari melanggar kode etik dengan memiliki hubungan dengan Hasnaeni, juga dikenal sebagai 'Wanita Emas' (Asusum.co)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung kasus yang diajukan Partai Prima terkait kecurangan dalam tahapan memilih partai peserta pemilu, seperti halnya masalah skandal. Menurut putusan Bawaslu, KPU melanggar prosedur verifikasi administrasi. Lebih lanjut Bawaslu menilai KPU tidak sepenuhnya melaksanakan keputusannya. Menurut Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pelanggaran administratif, seperti halnya PKPU 4 Tahun 2022 (<https://katadata.co.id>).

Tidak perlu heran atau heran dengan banyaknya kesulitan yang dialami KPU karena *track record* lembaga ini tidak pernah lepas dari tudingan kecurangan sejak tahun 2004 hingga 2019. Bedanya, tudingan penipuan yang dilayangkan ke KPU sebelumnya biasanya rancu. Sementara tudingan penipuan kini sudah kentara, kalau bukan menjijikan, karena diwarnai unsur "skandal".

Gerilya yang dilakukan oleh para politisi untuk menarik perhatian masyarakat di akar rumput mencerminkan kegembiraan menjelang pemilu 2024. Dari membagikan amplop berisi uang di tempat ibadah hingga menggunakan jabatan publik untuk mempromosikan diri melalui berbagai jenis acara yang dilakukan oleh para politisi. Apalagi papan reklame berwajah politisi sudah mulai bermunculan di berbagai pelosok Indonesia. Yang lebih absurd lagi adalah kemunculan tak terduga dari sekelompok individu yang mengambil tindakan dan membentangkan spanduk untuk mendukung tokoh-tokoh terkemuka. Lantas, setelah 25 tahun reformasi bertahap, mengapa kualitas pemilu masih jauh dari cita-cita reformasi 1998?

Demokrasi yang dimaksudkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang beretika dan mampu melepaskan diri dari sikap *feodalisme juncto* korupsi ternyata belum menghasilkan pemimpin-pemimpin yang demikian. Sebaliknya, demokrasi menjadi mesin yang melahirkan politisi-politisi yang tidak beretika dan terobsesi dengan feodalisme dan korupsi. Memang, Armada Riyanto menyebut demokrasi Indonesia sebagai "demokrasi krisis paham dalam konstitusi Indonesia".

Penulis tidak ingin langsung menjawab pertanyaan ini, lebih memilih menyerahkannya kepada pembaca untuk dipertimbangkan. Meskipun demikian, penulis ingin mengajak semua pembaca untuk merenungkan uraian yang diberikan di bawah ini. Mudah-mudahan, ini akan membantu pembaca dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas. Mari kita mulai dengan hati-hati menganalisis contoh berikut oleh Sabrang M.D.P: Ada serigala yang memakan domba dalam rantai makanan karena ada keseimbangan, dan cuaca yang sesuai jelas dibutuhkan untuk membangun keseimbangan. Karena pengaruh cuaca dimana bibit tumbuh besar. Kurma dan kaktus tumbuh subur di iklim panas. Mangrove tumbuh subur di tempat yang airnya payau. Cuaca tidak dianggap sebagai faktor dalam rantai makanan, meski berdampak padanya. Banyaknya rumput yang tumbuh sangat dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan.

Jika benih yang ditanam di tanah Indonesia adalah demokrasi, dan yang tumbuh dari benih itu adalah pemangku kepentingan *juncto* politisi seperti sekarang, maka benih itu tidak akan mendapat cuaca yang layak. Penulis menyinggung budaya politik Indonesia yang masih diwarnai hubungan patron-klien, feodalisme, politik uang, dan dendam.

Harus diakui bahwa saat membahas kerusakan lingkungan politik Indonesia, penulis tidak pernah mempertimbangkan pengaruh cuaca. Terlepas dari kenyataan bahwa cuaca merupakan elemen kunci dalam pengembangan tanaman. Selama ini kerusakan ekosistem politik Indonesia hanya dilihat dari perspektif sistem (demokrasi) dan figur. Padahal cuaca (budaya politik) membentuk sistem dan figur yang menampilkan politik Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila demi pembangunan nasional dewasa ini (Dewantara, 2018). Jika kondisi ini tidak bertahan, suasana politik Indonesia harus diubah. Tentu saja, mengubah ini tidak mudah; itu membutuhkan perubahan total pada tingkat konsepsi dan perbuatan inovatif (Riyanto, 2019).

Pada tingkat konseptual, negara kita harus menyadarkan republik sebagai sistem filsafat politik. Mengaktifkan kembali republik berarti mengubah semua sikap warga negara tentang politik dan demokrasi (Riyanto, 2017: 65). Sementara itu, tindakan rakyat harus menegaskan kembali asas *res publica res populi*, yang menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut urusan publik harus diarahkan kepada rakyat. Alhasil, pesta demokrasi (pemilu) adalah urusan rakyat, bukan segelintir elite. Namun, jika pesta demokrasi telah dimonopoli oleh sekelompok kecil elit politik, masyarakat umum harus melakukan tindakan revolusioner dengan tidak memilih atau memboikot pemilu!

6. Alienasi Golput

Antara pertengahan 1971 dan 1982, ada dukungan besar-besaran untuk bagian kulit putih pada surat suara pemilu. Mereka juga menempatkan segi lima dengan garis hitam dan penutup putih di samping bendera partai yang menghiasi jalan-jalan kota selama genderang pemilu. Ali Murtopo menyebut kelompok itu sebagai bau yang tidak enak “Saya Golput.” Golput terlihat dalam pemilu 1971. Golput adalah kekuatan pendorong bagi pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, dan mereka sering mempengaruhi pemilu.

Tempo menerbitkan sebelum Kampanye Mengalahkan Putih pada 13 Maret 1982, mengklaim bahwa penyebab pertarungan solidaritas kelompok kulit putih telah kembali. Penyebabnya adalah ketidakpuasan ketika partai politik gagal berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tujuan politiknya tidak dapat diterima oleh partai politik. Sebagai perbandingan, bayangkan memasuki telinga kanan melalui telinga kiri. Lebih lanjut, sebagai koordinator Lembaga Pembangunan Nasional (Lappenas) saat itu, Imam Waluyo memandang pemilu sebagai formalitas belaka. Maklum, berdasarkan warna bendera partai yang beragam, warna kuning akan menang. Imam Waluyo mengimbau setiap orang yang merasakan hal yang sama untuk mencoblos di bagian putih surat suara.

Abstensi terhambat oleh hal-hal positif dan negatif. Arief Budiman diam-diam menanggapi tarik ulur antara isu kepentingan dan kecaman keras terhadap Kelompok Putih. Feisal Tamin, juru bicara Departemen Dalam Negeri saat itu, menyinggung soal Golput. Menurutnya, penulisan *white space* di kertas pemilu tidak tepat karena merupakan hak asasi manusia. Masalah muncul ketika dia meminta orang untuk memberikan suara dalam jumlah besar untuk sisi putih surat suara. Tak hanya itu, Feisal Tamin menyebut hak pilih dari sisi agama. Warga negara yang tidak memilih termasuk dalam kategori seseorang yang melakukan dosa di matanya. Hal ini disebabkan hak pilih setiap individu mempengaruhi pola tingkat pertumbuhan di masa mendatang.

Dari segi politik dan pemilu, kita akan melihat pembentukan pesta demokrasi dalam waktu kurang dari setahun. Beberapa caleg atau eksekutif sudah mulai mencium peluang menggairahkan partai politik pada 2024. Golongan putih masih membayangi. Mereka adalah bagian dari skeptisisme elit politik yang seringkali terputus dari massa. Buku *Cheppy* Haricahyono Ilmu Politik dan Perspektif (1981) terbitan Tiara Wacana membahas tentang hakikat partai politik. Syahdan, partai politik, merupakan komponen penting dari demokrasi. Kekesalan terhadap partai politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konten partai politik yang kadang kontradiktif. Arief Budiman dan Imam Waluyo termasuk di antara mereka yang dikhianati, menghasilkan segi lima hitam yang menunjukkan abstain.

Dalam buku itu, Edmund Burke dikutip membahas isi partai politik. Adalah kumpulan orang-orang yang telah menyepakati filosofi yang akan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Menurut Burke, partai politik harus didirikan atas dasar melayani kepentingan nasional daripada kepentingan kelompoknya sendiri. Tempo 10 Februari 2019 menggali lebih dalam mengapa golput dalam pemilihan umum bermasalah. Adanya partai politik di Indonesia yang kurang mampu memberikan jawaban atas kuldesak

menjadi penyebabnya. Terlepas dari kenyataan bahwa partai politik ada untuk melayani demokrasi, kompetensi dalam kebijakan yang tepat merupakan beban berat bagi demokrasi dan hal-hal sepelanya.

Golput adalah duri di sisi otoritas. Pokja adalah poin penting di Era Orde Baru, dan sering ikut campur untuk memenangkannya. Hari ini, setiap kandidat harus menggunakan strategi populis baru untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Selain memiliki akses yang kuat, nilai partai politik akan mempengaruhi kepercayaan. Korupsi, premanisme, dan kolaborasi dengan pandangan dunia moralistik adalah beberapa alasan ketidakpercayaan yang menyebabkan ledakan Abstensi. Pemilih sangat memperhatikan citra partai politik. Namun, keberadaan partai politik lebih dari sekedar logo atau tanda. Tapi komitmen untuk mendengar suara rakyat. Pemilihan sering diwarnai dengan ketidakhadiran. Golput akan terus meningkat selama elit politik tidak tertarik untuk mempromosikan orang miskin.

Meskipun partai politik sangat penting bagi demokrasi, keberadaannya seringkali membingungkan publik. Dasar Majalah Nomor 07-08/62/2013, menunjukkan alasan mengapa pemilih tidak dapat dipercaya oleh partai politik. B. Herry Juliawan berkontribusi pada artikel berjudul *Panggung Politik Badut dan Monster* (Kompasiana.com). Judulnya menarik, namun ada beberapa arti penting bagaimana titik puncak pemilihan kelompok kulit putih lahir.

Menurut Juliawan, Winters (2011), oligarki adalah mereka yang menguasai demokrasi. Satu persen orang kaya mengendalikan 46,6 persen kesejahteraan orang lain (Global Wealth Report, 2018). Atas dasar pemikiran inilah Boikot datang untuk menguasai satu persen melalui perselingkuhan antara uang dan politik (baca: politik uang), membuatnya semakin skeptis terhadap kontestasi politik di Indonesia.

Kesadaran politik berujung pada kajian terhadap masing-masing dalam konteks kondisi terkini. Arief Budiman lainnya mungkin masih bolak-balik mengkritik demokrasi Indonesia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk melompat atau tidak, dan tidak ada asap tanpa membakar api. Partai politik harus memeriksa diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka beroperasi di jalur yang tepat, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi kita.

7. Relevansi: Etika Politik Kasih

Dalam era kontemporer yang ditandai oleh dominasi politik individualisme, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan munculnya polarisasi sosial dan kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan individu. Dengan menganalisis konsep "Politik Kasih" sebagai alternatif, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai solidaritas dan perhatian terhadap sesama dapat mengimbangi efek negatif dari politik individualisme. Konsep "Politik Kasih" yang dijelaskan dalam Fratelli Tutti 154 menawarkan perspektif baru dalam merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan kesetaraan. Dengan diskursus yang mendalam, penelitian ini mengungkapkan bahwa "Politik Kasih" sebagai konsep mengandung potensi yang kuat untuk merespons tantangan politik individualisme.

Hasil penelitian ini menggambarkan secara konsisten menyoroti kelemahan politik individualisme dalam menciptakan ketidaksetaraan dan isolasi sosial. "Politik Kasih" sebagai pendekatan yang lebih holistik, mempromosikan inklusivitas, perhatian pada kelompok yang rentan, dan pembangunan masyarakat yang lebih adil. "Politik Kasih" memerlukan transformasi paradigma politik, di mana pemimpin dan pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan umum.

Konsep "Politik Kasih" dalam menantang dominasi politik individualisme memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana pandangan etika politik, terutama yang terkandung dalam Fratelli Tutti 154, dapat diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penelitian ini mengilustrasikan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam politik untuk menghadapi permasalahan kompleks dalam masyarakat kontemporer.

Penulis melihat isu politik dalam pemilu yang penuh drama dan berbahaya ini, penulis mengajak pertama kepada pemerintah agar lebih sigap, perhatian dan tegas menanggapi isu pemilu dengan segala kegiatan kampanye buta yang mengatasnamakan agama. Siapapun yang bertugas dalam pemilu ini hendaknya mengambil langkah-langkah positif 'politik kasih' sehingga pemilu berlangsung baik, lancar, damai dan adil baik untuk pemerintah maupun terutama rakyat kecil. Armada Riyanto (20003) menyebutnya dengan krisis paham kenegaraan yang termuat dalam konstitusi Indonesia. Dalam hal ini prinsip negara hukum adalah melindungi martabat manusia (HAM) di mana terutama pemerintah, Paus Fransiskus melalui Ensikliknya Fratelli Tutti (162) menegaskan dalam arti sesungguhnya, pemerintah ialah dia yang mengupayakan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Ia merakyat. Ia populis, tetapi bukan demi popularitas. Ia bekerja untuk menumbuhkan benih kebaikan dalam diri rakyat, demi masa depan rakyat. Terkait tema ini, Paus mengangkat isu lapangan pekerjaan. Seorang leader yang merakyat mengupayakan lapangan kerja bagi rakyat, bukan hanya untuk mendapat gaji, tetapi sebagai wadah pengungkapan bakat dan kemampuan, untuk hidup lebih manusiawi, dan pada gilirannya berbuat baik sebagai warga negara.

Kepada masyarakat hendaknya lebih cermat, cerdas, kritis dan analitis tajam dalam melihat isu pemilu. Jangan mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang senyatanya perlu difilter dan dipelajari lebih dalam. Jangan mudah terpancing dan terbawa arus pada isu pemilu dengan segala iming-iming, janji dan suapan-suapan maut untuk memenangkan kelompok tertentu dengan cara tak adil dan melanggar norma dan aturan pemilu. Jangan sampai kita salah melangkah dan memilih pemimpin negara ini karena masa depan kesejahteraan dan kebaikan kita ditentukan oleh pemimpin negeri ini yang sangat jarang memperhatikan kehidupan dan penderitaan rakyatnya. Riyanto (2017) menyebutnya 'aku Indonesia, aku Pancasila' suatu kesadaran politik untuk konstruksi diri. Dalam hal ini Paus Fransiskus melalui Fratelli Tutti (167) mengajak dunia pendidikan untuk memainkan peran penting membentuk kesadaran orang akan sebuah pandangan tentang manusia secara integral, yang tidak memihak pada kepentingan ekonomi, politik, dan media. Kaum politikus ditantang untuk memandang rakyat sebagai komunitas sosial, bukan individu yang mengklaim selalu memiliki solusi atas berbagai kesulitan dalam kehidupan.

Partai politik juga hendaknya sadar bahwa dasar dari pemilu yang bersih, jujur dan adil adalah mengikuti norma dan aturan pemilu yang baik dan benar sebagaimana terdapat dalam nilai luhur Pancasila (iman, harapan dan kasih), perjuangan martabat luhur manusia yang sama dan sederajat, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kebajikan dan kebijaksanaan dalam hikmat kepemimpinan yang baik dan benar, dan terakhir adalah prinsip keadilan sosial, kesejahteraan dan perdamaian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini para politikus harus benar-benar memahami makna berpolitik yang sesungguhnya (Riyanto: 2019:78) Di hadapan kenyataan ini, Paus dalam Ensiklik Fratelli Tutti (165) menegaskan kebajikan Kristiani: Kasih (caritas) mempersatukan semua. Kasih menggerakkan orang menjumpai sesama dan memperlakukannya sebagai rakyat, dan lebih jauh sebagai saudara dan saudari. Ini butuh kerja sama pada level kebaikan bersama. Ada berbagai aliran politik, gerakan sosial. Namun tanpa dasar kasih, semua hanya menjadi proyek instan.

Akhirnya penulis mengajak semua elemen pemerintah, Gereja dan rakyat agar mendasarkan pola pikir yang kritis bahwa kepentingan yang utama dari pemilu adalah kebaikan bersama *bonum commune*. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Prinsip *bonum commune* harus sudah melekat dan terpatri di pikiran, hati nurani yang baik dan seluruh keputusan dan tindakan kita semua. Fratelli Tutti (176-177) kiranya jelas bahwa bagi banyak orang sekarang ini, ‘politik’ adalah kata yang buruk. Ini bisa dimengerti, sebab nyatanya dalam politik terjadi banyak korupsi dan kepentingan ideologis. Sistem politik dengan motif ekonomi adalah sistem politik yang tidak sehat. Motif ekonomi menyebabkan penegakkan hukum lemah. Kita perlu memikirkan sistem politik yang sehat yakni politik kasih. *Bonum commune* akan terwujud jika struktur politik tidak diskriminatif (terbuka bagi semua warga negara) dalam tata hukum, sistem pemerintah, pengakuan atas hak privat, hak berkemunitas dalam kreativitas dan inovasi, serta campur tangan pemerintah dalam menata hidup yang baik. Seorang warga terpanggil untuk melakukan aksi solidaritas; seorang politisi terpanggil mengupayakan aksi subsidiaritas: menyediakan sarana distribusi barang kebutuhan rakyat secara lebih luas dan tentu demi kebaikan rakyat yang lebih banyak. Politik itu mulia, ia adalah ruang untuk melakukan aksi kasih yang lebih besar demi kesejahteraan umum. Dengan kesadaran penuh bahwa pemilu bukan pesta kaum politikus atau partai saja melainkan pesta rakyat di mana rakyat menjadi asas dan dasar dari demokrasi Pancasila yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kesimpulan

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pentingnya konsep "Politik Kasih" sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh politik individualisme dalam konteks etika politik, dengan merujuk pada pandangan yang diungkapkan dalam artikel 154 ensiklik Fratelli Tutti Paus Fransiskus. Dalam era yang ditandai oleh individualisme yang semakin kuat, konsep ini muncul sebagai alternatif yang menawarkan cara berpikir dan bertindak yang lebih inklusif, peduli terhadap sesama, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan diskursus dengan studi kasus, penelitian ini berhasil mengumpulkan pandangan yang mendeskripsikan pemahaman mendalam tentang etika politik dan implikasi dari konsep "Politik Kasih". Ditemukan bahwa "Politik Kasih" memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan politik individualisme, yang sering kali mengakibatkan kesenjangan sosial, isolasi, dan merosotnya nilai-nilai kolektif.

Diskursus ini menemukan temuan bahwa "Politik Kasih" memerlukan transformasi paradigma politik dan peran aktif pemimpin dalam mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menekankan inklusivitas, solidaritas, dan perhatian pada kelompok yang rentan sebagai pijakan penting dalam mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. "Politik Kasih" merupakan perlawanan yang potensial dan relevan terhadap dominasi politik individualisme. Dengan merujuk pada ajaran Fratelli Tutti 154, penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk menerapkan nilai-nilai kasih, perhatian, dan keadilan sosial dalam arena politik. Transformasi menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif diharapkan dapat meretas jalan menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berfokus pada kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Andalas, P. Mutiara. (2008) *Kesucian Politik: Agama dan Politik di tengah Krisis Kemanusiaan*. Jakarta: Libri PT BPK Gunung Mulia.
- Aliano, Yohanes Alfrid Dan F. X. Eko Armada Riyanto. (2022). Pemulihan Martabat Manusia Dalam Perspektif Metafisika Persahabatan. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 5(2):162–72.

- Arif, M. (2015) *Individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global)*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Ariana, Riska. (2016). Meta-Etika Politik Di Era Post Truth (Studi Prilaku Elit politik Perspektif Etika Emotivis Bertrand Russell). *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2).
- Ericha, F. (2019, July 4). Indonesia Negara Pancasila Atau Negara Agama ? Dilihat Dari Weltanschauung Bangsa Indonesia.
- Fransiskus. (2020). Fratelli Tutti Saudara Sekalian. (124):5–180.
- Hadi, R. T., & Arrasyid, A. (2021). Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(2), 200-213.
- Hasfi, N. (2019) Komunikasi Politik di Era Digital. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 10(1): 93-111.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih. Sunderman, *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, sains, Humaniora dan Kebudayaan STT BNKP Sunderman*, 13(1): 40-47.
- Haricahyono, C. (1986). *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana.
- Kartika, I. Made. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwandra* 4(1).
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas*, 6(2): 49-68
- Miftahul Reski Putra Nasjum. (2020). Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, 22(1):147–54.
- Paus Fransiskus. Fratelli Tutti Saudara Sekalian. Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial 3 Oktober 2020. Seri Dokumen Gerejawi No. 124. Penerj. Martin Harun, OFM. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. 2021.
- Putra, D. K. S. (2019). *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ritaudin, M. S. (2014). Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis Dan Rasional Politik Bangsa. *Jurnal Tapis* 10(2):12–32.
- Riyanto, A. (2003). Krisis Paham Kenegaraan : Dalam Konstitusi Indonesia. *Studia Philosophica Et Theologica* 3(2):79–99.
- Riyanto, Fx. Eko Armada. (2017). Aku Indonesia, Aku Pancasila' Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri. *Seri Filsafat Teologi* 27(26):59–70.
- Riyanto, A. (2019). *Berfilsafat Politik*. Kanisius: Yogyakarta.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13-28.
- Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. *Jurnal Konstitusi* 14(1):168-87.
- Tinambunan, E. R. (2023). Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 87-106.